DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi. 2017. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika. Jakarta.

Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih. 2016. P*engawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara.*PT Buku Seru. Jakarta.

Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya.* Sinar Grafika. Jakarta.

Dwi Haryadi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Kampus Terpadu Bangka Belitung. UBB Press.

Fajlurrahman Jurdi. 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Rangkang Education dan Republik Institute. Yogyakarta

Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.

Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020.*Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mirra Buana Media.

Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka refleksi. Makassar.

Muhammad Akib. 2016.*Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*. Jakarta. Rajawali Pers.

Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara* (Buku Ajar). Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Nandang Sudrajat. 2010.*Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara.* Sinar Grafika. Jakarta.

Ramlan dan Muhammad Yusrizal. 2012.*Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*. Ratu Jaya. Medan.

Ridwan HR. 2013.*Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintah*. Cendekia Press. Bandung

Saiful Anwar. 2004.*Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Pers. Jakarta.

Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.* Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Salim HS. 2014.*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Cv. Widya Karya. Semarang

JURNAL

Achmad Fauzi. *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.* Jurnal Spektrum

Hukum. Vol.16. No. I. 2019.

Arini Nur Annisa, Mutiah Wenda Juniar, Rismawati Nur, Muh Ramadhansyah Prasetia. *Government Supervision of The Rights Fulfillment of Housed Workers in The Transition Period*. Awang Long Law Review. Vol.5 No. 1. 2022.

Dudung Abdullah. *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.* Jurnal Hukum Positum. Vol. 1. No. 1. 2016.

Cristo VIki Lumintang, Ronald J. Mawuntu dan Delasnova S. S. Lumintang. *Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.* Lex Et Societatis. Vol. VIII No. 4. 2020.

E M Djafar, T F Widayanti, M D Saidi, A M Muin, Ratnawati. *"Forest management to Achieve Sustainable Forestry Policy in Indonesia*",. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1181 012021

Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia.* Lex Prafitum. Vol. X No. 3. 2022.

Lukman Hakim. *Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi. Vol. IV No.1. 2011.

Moh Gandara. *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*. Khazanah Hukum. Vol. 2 No.2. 2020.

Mifta Farid. *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarajat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. Lentera Hukum. Volume 4 Issue2. 2017.

Olivia Kawuwung. *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Tidak Sesuai Prosedur Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.* Lex Crimen. Vol. VII. No.10. 2018.

Syahrul Ibad. *Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Hukum Hukmy. Volume 1 No.1. 2021.

INTERNET

https://www.infochanelnasional.com/2020/05/penambang-pasir-di-bakkoko-pinrang.html diakses pada hari Senin, 19 September 2022, Pukul 17.11 WITA.

https://pinrang.terkini.id/2021/07/31/tambang-pasir-ilegal-problem-klasik-yang-penegakan-hukumnya-masih-setengah-hati/ , diakses pada hari Senin, 19 September 2022, Pukul 19.11 WITA.

https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6290620/warga-pinrang-geruduk-gedung-dprd-desak-tambang-ilegal-ditutup , diakses pada hari senin, 15 Oktober 2022, Pukul 17.32 WITA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja cabang dinas energi dan sumber daya mineral.

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **19871/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 2266/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 18 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**ANDI ANNISA JULIANA SAPUTRI**
Nomor Pokok	:	B021181316
Program Studi	:	Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. P. Kemerdekaan Km,. 10 Makassar

ptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***21 Juni s/d 21 Juli 2023***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan : A. Pangerang Pettarani Telp. (0411) 873045 – 873524 – 874467 Fax. (0411) 873524

MAKASSAR

Kode Pos : 90222

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 1625 /DESDM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: H. A. Eka Prasetya, S.Sos., M.M.
NIP	: 19800329 200212 1 003
Pangkat / Golongan	: Pembina Tingkat I
Jabatan	: Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan Bahwa Mahasiswa (S1) UNHAS Makassar di bawah ini :

Nama	: Andi Annisa Juliana Saputri
Nomor Pokok	: B021181316
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan / Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar

Telah selesai melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul ***"Pengawasan Pertambangan Pasir Sungai Ilegal Di Kabupaten Pinrang "***

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

H. A. EKA PRASETYA, S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19800329 200212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
Jl. Poros Pinrang-Polman Lampa No. 363
Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN
Nomor : 410.7 / 91 /KDP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MUH. DIRHAM, S.IP.**
NIP	:	**19690706 200701 1 052**
Jabatan	:	**Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Menerangkan bahwa :

Nama	:	**ANDI ANNISA JULIANA SAPUTRI**
No. Pokok	:	**B021181316**
Fakultas	:	**HUKUM**
Jurusan	:	**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Nama Lembaga	:	**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Benar telah selesai melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei s/d 2 Mei 2023 di Kecamatan Duampanua untuk Menyusun Skripsi dengan Judul. **"PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG".**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampa, 05 Mei 2023

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN RAKYAT

MUH. DIRHAM, S.IP.
Pangkat : Penata Tk I
NIP. 19690706 200701 1052